

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.I Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: Blakely, 1989).

Menko perekonomian Hatta Rasaja menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menampung penambahan angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi satu persen hanya bisa menampung 350.000 pekerja, menurut skenario optimistis Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perekonomian hanya bisa tumbuh rata-rata 6,9 persen per tahun dalam lima tahun kedepan. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah mesti bekerja keras untuk menghapus segala macam hambatan seperti infrastruktur yang buruk, ketersediaan energi, pembiayaan yang mahal. (Kompas,2009)

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Yang perlu diperhatikan adalah sisi output totalnya (PDB) dan jumlah penduduknya. Output perkapita adalah kenaikan output total dibagikan dengan jumlah regional digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat

pertumbuhan penduduk, atau ada tidaknya perubahan dalam struktur ekonomi (Sukirno,2000:19). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan - kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik (Hera, At. All, 1995:23).

Menurut Rahardja, istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu Negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produk barang dan jasa meningkat. Angka yang digunakan untuk menaksir pertumbuhan ekonomi adalah PDRB harga konstan karena telah dihilangkan pengaruh inflasinya.

Hal ini sejalan dengan pendapat I Made Dharma Setiawan yang menyatakan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan dengan cara melakukan perhitungan pendapatan daerah yang didasarkan atas harga konstan.

Sedangkan menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut pandangan para ekonom klasik maupun ekonom neoklasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal,

luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Mudrajad, 2004)

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan 3 ciri pokok, yaitu: Laju pertumbuhan, pendapatan perkapita riil, distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkah dan pola persebaran penduduk.

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith sebagai pelopor teori klasik mengatakan bahwa output akan berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk. Pertambahan penduduk berarti peningkatan produk nasional. Teori pertumbuhan klasik juga mengemukakan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk yang dikenal dengan teori penduduk optimum. Teori ini menyatakan bahwa :

- Apabila produksi marginal lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita, jumlah penduduk sedikit dan tenaga kerja masih kurang, maka pertambahan jumlah penduduk akan menambah tenaga kerja dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.
- Penduduk akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi terjadi penurunan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang peningkatannya semakin kecil.

- Apabila produk marginal bernilai sama dengan pendapatan per kapita, yang berarti pendapatan perkapita yang maximum dengan jumlah penduduk optimal, maka penambahan penduduk akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Menurut Robert Solow, pertumbuhan produk nasional ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input (pertumbuhan modal dan pertumbuhan tenaga kerja), kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian serta keterampilan tenaga kerja. Apabila terjadi penambahan modal, berarti terjadi peningkatan kegiatan usaha yang akan memperluas lapangan pekerjaan. Produksi optimum baru akan diperoleh apabila diikuti dengan kemajuan teknologi dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja. Selanjutnya, produktivitas akan meningkat dan terjadilah pertumbuhan produk nasional di wilayah tersebut.

Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari berbagai perubahan, yaitu: perubahan reorganisasi ekonomi, perubahan pandangan masyarakat, perubahan cara menabung atau menanam modal serta perubahan pandangan terhadap faktor alam.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

2.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan pendekatan kinerja dalam struktur anggaran daerah, pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang

konsumsi, sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif, karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah. Hal inilah yang membuat pengeluaran pembangunan umumnya disebut sebagai investasi pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesebroto,2000:169).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Teori Di bawah ini adalah teori-teori pengeluaran baik secara makro maupun secara mikro.

2.2.2 Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Rostow dan Musgrave.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan perasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, perasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investai swasta sudah semakin membesar. Peranan

pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan hubungan antar sektor yang semakin rumit (complicated). Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan perasarana ke pengeluaran- pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikembangkan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak Negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Di sini diperlukan pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain.

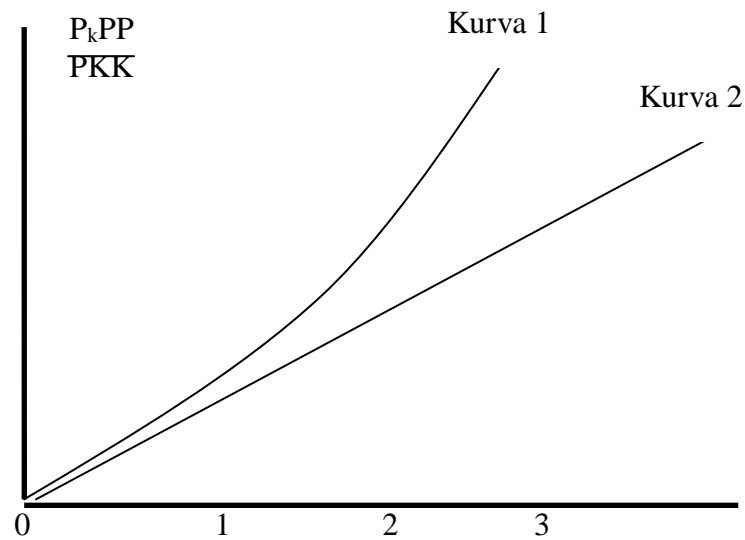
b. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, USA, dan Jepang pada abad

ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relative ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh hukum wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum wagner adalah sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyatakan berdasarkan pengamatan dari negara- negara maju disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu Negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita Negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari Negara tersebut. . Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait

Kelemahan hukum wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori orgonis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pamerintah sebagaimana individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya

Hukum wagner dapat diformulasi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut wagner

c. Teori Peacock dan Wisemen

Peacock dan Wisemen adalah dua orang yang menemukan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori peacock dan Wismen merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan wismen mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan

pemungutan pajak secara semena-mena teori peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut : Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang karena itu penerimaan dari pajak akan meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan, (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas.

2.3 INVESTASI

Secara umum investasi meliputi penambahan barang - barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, pembukaan tanah baru dan sebagainya.

Menurut Sadono Sukirno (2008), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang- barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dengan

perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu dalam prekonomian. Dalam peraktiknya, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

- Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan
- Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya
- Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Michael P.Todaro (2004:127), menyatakan sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang disebut investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam prekonomian.

Dari beberapa pendapat diatas tentang investasi, maka dapat disimpulkan investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

2.3.1 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Nasution (1998:105) secara umum didalam pembangunan ekonomi terdapat 4 jenis investasi, yaitu:

- a. Investasi yang terdorong (Induced Investment) dan Investasi otonom (autonomous Investasi)

Investasi yang tergolong (Induced Investment) yaitu investasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan baik itu pendapatan pusat maupun nasional. Investasi ini diadakan akibat adanya penambahan permintaan, penambahan permintaan yang mana adalah akibat penambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah maka penambahan permintaan akan digunakan untuk tambahan konsumsi, dan apabila ada tambahan permintaan akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.

Investasi otonom yakni investasi yang dilakukan oleh pemerintah karena disamping biayanya sangat besar juga investasi ini tidak memberikan keuntungan, dimana besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan pusat atau nasional tetapi dapat berubah karena adanya perubahan faktor-faktor pendapatan seperti tingkat teknologi, kebijaksanaan pemerintah, harapan para pengusaha dan sebagainya. Investasi ini dilakukan atau diadakan secara bebas, artinya investasi ini diadakan bukan karena penambahan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung pada besar kecilnya pendapatan nasional. Dengan perkataan lain tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan contohnya investasi bendungan untuk saluran irigasi

tidak akan memberikan keuntungan kepada pemerintah tetapi dengan irigasi akan meningkatkan produksi hasil pertanian.

b. Public Investment and Privat Investment.

Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah pusat/daerah yang bersifat resmi.

Sedangkan *privat investment* adalah investasi yang dilakukan oleh swasta, dimana keuntungan yang menjadi prioritas utama berbeda dengan *public investment* yang diarahkan untuk melayani dan mencibitakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

c. Domestic Investment and Foreign Investment

Domestic Investment adalah penanaman modal dalam negeri *foreign investment* adalah penanaman modal asing. Suatu Negara yang memiliki banyak sekali faktor- faktor produksi namun tidak memiliki faktor produksi modal yang cukup untuk mengolah sumber- sumber yang dimilikinya itu, akan mengundang modal asing ini, agar sumber-sumber yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

d. Gross Investment and Net investment

Gross investment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu. jadi mencakup segala jenis investasi, baik itu *autonomous* maupun *induced*, baik *privat* maupun *public*, artinya seluruh investasi yang dilakukan disuatu Negara atau daerah pada atau Selama suatu priode waktu tertentu dinamakan *gross investment*. *Net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi bruto tahun

ini 30 juta sedangkan penyusutan yang terjadi selama tahun lalu 10 juta maka investasi netto nya adalah sebesar 20 juta.

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

❖ Tingkat bunga

Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu Negara. Apabila tingkat bunga rendah maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi karena kredit dari bank masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaliknya tingkat bunga tinggi, maka investasi kredit bank tidak menguat

Dalam literatur ada istilah yang dapat digunakan untuk melihat tingkat suku bunga dari investasi yaitu:

1. *Marginal efficiency of investment* (MEI), yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi yang senyatanya dilakukan oleh para pengusaha dalam jangka waktu tertentu.
2. *Marginal efficiency of capital* (MEC), yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan penanaman modal yang seharusnya dilakukan untuk usaha-usaha, tingkat pengembalian modalnya (rate of return) nya lebih besar dari pada tingkat suku bunga berlaku.

Keynes mengatakan bahwa investasi baik ditinjau dari penentuan jumlahnya maupun kesempatan untuk mengadakan investasi itu sendiri, didasarkan pada konsep *Marginal efficiency of capital* (MEC). MEC merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan (Return of investment)

❖ **Peningkatan aktivitas prekonomian**

Harapan adanya peningkatan perekonomian di masa yang akan datang, merupakan salah satu faktor penentu untuk mengadakan investasi atau tidak. Kalau ada perkiraan akan terjadi peningkatan perekonomian di masa yang akan datang, walaupun tingkat bunga lebih besar dari tingkat MEC (sebagai penentu investasi), investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh investor yang instingnya tajam melihat peluang meraih keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang.

❖ **Kemajuan Teknologi**

Yang menentukan besarnya investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha adalah kegiatan para pengusaha untuk menggunakan penemuan-penemuan teknologi yang baru dalam proses produksi. Kegiatan para pengusaha untuk menggunakan dikembangkan didalam kegiatan produksi atau manajemen dinamakan mengadakan pembaharuan atau inovasi.

❖ **Tingkat keuntungan yang akan diperoleh**

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran pada pengusaha untuk melakukan investasi saat ini atau di masa depan.

2.3.3 Dasar Teori Investasi

a. Teori Klasik (Adam Smith)

Semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Karena itu mereka menekankan betapa pentingnya tabungan dalam jumlah yang besar. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu menabung. Kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan tingkat kebutuhan hidup minimal.

Menurut kaum klasik dalam jinghan (2000:101), keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Namun keuntungan tidak akan naik secara terus menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis semakin meningkat. Alasannya ialah naiknya upah dan sewa naik, maka keuntungan menurun.

b. Teori Keynes

Menurut Keynes dalam jinghan (2000:168) Pendapatan total merupakan fungsi dari pada pekerja total dalam suatu Negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya demikian juga sebaliknya. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk mengkonsumsi, jurang antara pendapatan dan konsumsi ini hanya dapat dijemptani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi maka permintaan agregat akan turun lebih rendah dari penawaran agregat. Akibatnya pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani. Efisiensi marginal dari modal merupakan tingkat hasil yang

diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi pengusaha akan menginvestasikan tinggi.

Suku bunga merupakan faktor lainnya dari investasi, teragantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikan melalui investasi marginal atau penurunan akan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa saja terjadi bila pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun. Sebaliknya, naiknya kecenderungan mengkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan tanpa kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (kumulatif). Akibatnya kenaikan tertentu pada investai menyebabkan kenaikan yang berlipat ganda pada pendapatan melalui kecenderungan mengkonsumsi. Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier (K). Penggali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan mengkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Berarti bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya adalah:

$$\Delta Y = K \Delta I \dots \dots \dots (4.1) \text{ (sukirno 2000:75)}$$

Dengan $1-1/K$ mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi multiplier $K = 1/ 1- MPC$. Karena kecenderungan marginal mengkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis

besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian.

2.4 Pengertian Konsumsi Rumah Tangga.

Nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dalam analisis makro ekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membiayai jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dan perbelanjaan tersebut dinamakan konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut. Tidak semua transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga digolongkan sebagai konsumsi (rumah tangga). Kegiatan rumah tangga untuk membeli rumah digolongkan sebagai investasi. Suterusnya, sebagian pengeluaran mereka, seperti membayar asuransi dan mengirim uang kepada orang tua (atau anak yang sedang bersekolah) tidak digolongkan sebagai konsumsi karena ia tidak merupakan perbelanjaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.

Konsep yang dipakai dalam perhitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah:

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada wilayah domestik suatu region

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada rumah-rumah penduduk suatu region

Pengertian konsep *pertama* adalah pengeluaran oleh rumah tangga di suatu region, tidak terkecuali oleh penduduk atau bukan penduduk region tersebut. jadi, dalam hal ini semua pengeluaran oleh rumah tangga staff kedutaan asing, staff perwakilan daerah, anggota militer dan lain-lain berbeda di suatu wilayah serta, pengeluaran turis asing adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam suatu wilayah domestik regional tersebut.

Pengertian yang *kedua* adalah pengeluaran konsumsi pemerintah dalam wilayah domestik dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk diluar region, dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga bukan penduduk yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Konsep pengeluaran rumah tangga dalam komponen PDRB dari sudut penggunaan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.4.1 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi

a) Faktor-Faktor Ekonomi

❖ Pendapatan Rumah Tangga (*household Income*)

Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi ,makin tinggi tingkat pendapatan,tingkat konsumsi makin tinggi kerana ketika tingkat pendapatan meningkat ,kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi meningkat.

❖ **Kekayaan Rumah Tangga** (*household wealth*)

Yang tercakup dalam kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (misalnya rumah, tanah, dan mobil) dan financial (deposito berjangka, saham dan surat-surat berharga). kekayaan-kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan disposibel.

❖ **Tingkat Bunga**

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi konsumsi, dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Sedangkan bagi mereka yang meminjam kenaikan tingkat bunga akan mengurangi konsumsi. Tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan menyimpan uang di bank terasa lebih menguntungkan ketimbang dikonsumsi.

❖ **Perkiraan Tentang Masa Depan**

Jika rumah tangga merasa masa depannya makin baik, mereka akan lebih leluasa untuk meningkatkan konsumsi, karenanya pengeluaran konsumsi cenderung meningkat dan begitu juga sebaliknya.

b) Faktor- Faktor Non Ekonomi

Faktor- faktor non ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena keinginan meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat.

2.4.2 Teori Pengeluaran Konsumsi

a) John Meynard Keynes

Faktor terpenting yang menentukan besarnya pengeluaran rumah tangga baik perorangan maupun keseluruhan adalah pendapatan (income = Y). Income (Y) pada suatu waktu tertentu secara sederhana dapat digunakan untuk keperluan konsumsi (consumption=C) dan ditabung (saving=S). Secara matematis dituliskan ($Y=C+S$).

Pada tingkat income masyarakat sangat rendah pada umumnya pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari pendapatannya, sehingga pengeluaran konsumsi saat ini tidak hanya dibiayai oleh pendapatannya saja tetapi juga menggunakan sumber- sumber lain seperti tabungan dari waktu sebelumnya, menjual harta rumah tangga atau meminjam. Selanjutnya pada suatu tingkat income yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga akan sama besarnya dengan incomenya. Bila income meningkat lagi, maka rumah tangga akan mengalami kondisi kelebihan income karena pada saat itulah rumah tangga dapat menabung kelebihan income yang tidak digunakan untuk konsumsi.

Secara umum adanya pertambahan income ΔY diimbangi masyarakat dengan menambah konsumsinya ΔC . Rasio perubahan konsumsi terhadap income dikenal dengan kecenderungan mengkonsumsi marginal (marginal propensity to consume = MPC). Secara matematis ditulis

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

$$\Delta Y$$

Kenaikan income pada umumnya diiringi dengan kenaikan konsumsi rumah tangga, namun kecenderungan menunjukkan bahwa perubahan konsumsi

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan perubahan incomenya sehingga $0 < MPC \leq 1$ dan terdapat selisih yang positif akan menjadi tabungan (ΔS).

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta S$$

c. Teori Irving Fisher

Irving Fisher menganalisis bagaimana seorang konsumen yang rasional dan berpandangan kedepan membuat pilihan antar waktu yang berbeda (*intemporal choice*). Fisher menunjukkan kendala yang dihadapi konsumen dan bagaimana mereka memilih antar konsumsi dan tabungan. Ketika seseorang memutuskan berapa banyak pendapatan yang dikonsumsi dan berapa banyak yang akan ditabung, dia akan mempertimbangkan kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Semakin banyak dia konsumsi hari ini, maka semakin sedikit yang dia konsumsi di masa yang akan datang. Menurut Irving Fisher ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi :

a. The Intertemporal Budget Constraint

Salah satu alasan mengapa masyarakat mengkonsumsi lebih sedikit dari yang sebenarnya diinginkan adalah karena keterbatasan anggaran (*budget constraint*). Ketika mereka memutuskan berapa yang akan dikonsumsi saat ini dan berapa di masa depan mereka menghadapi apa yang disebut intemporal budget constrain.

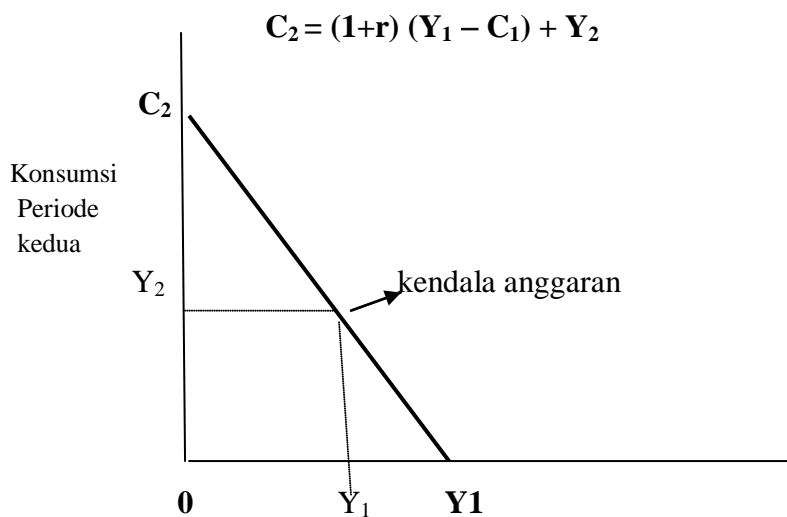
Untuk penyederhanan dianggap konsumen menghadapi dua periode waktu. Pada periode pertama, tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi, sehingga $S = Y_1 - C_1$

Pada periode kedua, konsumsi sama dengan akumulasi tabungan, termasuk pendapatan bunganya ditambah dengan pendapatan pada periode kedua sehingga,

$$C_2 = (1+r)S + Y_2$$

Dimana S adalah tabungan, Y_1 pendapatan pertama, C_1 konsumsi pertama, C_2 konsumsi kedua, Y_2 pendapatan kedua, r suku bunga.

Jika konsumsi pertama lebih kecil dari pendapatan pertama, konsumen akan menabung, sehingga nilai S lebih besar dari nol. Untuk mendapat kendala anggaran konsumen (*consumer's budget constraint*), kedua persamaan diatas dapat dikombinasikan menjadi



Gambar 2.2 : Anggaran Konsumsi

Gambar diatas menunjukkan anggaran kosumen. Pada konsumsi periode 1 sebesar Y_1 dan konsumsi pada periode kedua sebesar Y_2 ,sehingga tidak ada tabungan ataupun pinjaman pada kedua periode pertama dan menabung seluruh pendapatanya. Kosumen memilih kombinasi dibawah kendala anggara karena dia tidak menghabiskan seluruh pendapatnya. Sepanjang konsumsen rasional, dimana mereka lebih menyukai konsumsi yang banyak dibanding konsumsi yang sedikit

maka konsumen akan selalu memilih titik-titik pada garis kendala anggaran daripada dibawah garis anggaran.

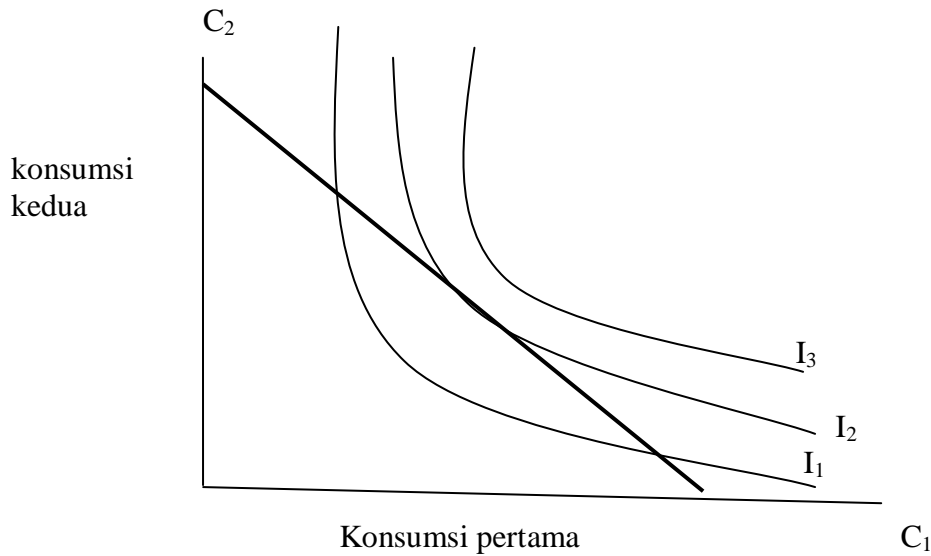
b.Selera Konsumen

Selera konsumen mengenai konsumsi pertama dan konsumsi kedua ditunjukkan oleh kurva indferen. Kurva idneferen menunjukkan kombinasi konsumsi pertama dan kedua yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen. Kemiringan disetiap titik menunjukkan tambahan konsumsi periode kedua yang diperlukan jika konsumsi pada periode pertama dikurangi sebesar satu satuan.

Kemiringan ini disebut tingkat konsumsi marjinal atau marginal rate of substitution (MPS). Konsumen menyukai kurva indferen yang berbeda semakin tinggi kurva ideferen semakin disukai oleh konsumen karena itu berarti kombinasi konsumsi yang diperoleh semakin besar.

c.Optimisasi

Untuk mendapatkan kebahagiaan yang maksimal, kosumen akan berusaha mencapai kurva ideferen yang setinggi-tingginya. Tetapi mereka akan dibatasi oleh anggaran yang dimilkinya.



Gambar 2.3: Kendala Anggaran Konsumsi

Gambar diatas menunjukkan bahwa beberapa kurva indeferen memotong garis anggaran. Kondisi optimum yaitu kombinasi kedua konsumsi pada kedua periode dicapai pada titik 0 dimana garis anggaran menyinggung kurva indeferen I_2 . Pada titik optimum, kemiringan kurva indeferen sebesar MRS sedangkan kemiringan dari garis anggaran adalah 1 ditambah suku bunga rill. Sehingga pada titik 0 dapat disimpulkan konsumen akan memilih kombinasi konsumsi pada kedua periode sampai tercapai MRS sama dengan 1 tambah suku bunga rill.

(Teddy H, At all.2001:222)

d.Pengaruh Perubahan Pedapatan Konsumen

Jika kendala anggaran semakin tinggi, berarti konsumen dapat mencapai kurva indeferen yang semakin tinggi pula. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh kombinasi konsumsi yang lebih besar pula dengan kenaikan pendapatan.

3.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran dan pendapatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, APBD sangat penting kedudukannya sebagai alat pengukuran yang sah berhasil atau tidaknya pemerintah daerah menggunakan keuangan daerah untuk digunakan untuk menutupi biaya pemerintah dan pembangunan daerah. APBD sepatutnya disusun secara seimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

3.1.1 Kriteria Penyusunan APBD

Arah kebijakan umum APBD dapat disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Daerah dan dokumen perencanaan lainnya ditetapkan oleh daerah.
- b) Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
- c) Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran.
- d) Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- e) Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksanaannya.

3.1.2 Fungsi APBN

APBN merupakan alat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam satu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan Negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara tahun anggaran berikutnya. Merujuk pasal 3 ayat (4) UU no.17/2003, APBN mempunyai fungsi antara lain :

1. Fungsi Otoritas

Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada awal tahun yang bersangkutan. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka Negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung perbelanjaan tersebut.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Negara sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian mudah bagi masyarakat menilai tindakan pemerintah menggunakan uang.

4. Fungsi Alokasi

Mengandung arti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

5. Fungsi Distribusi

Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi Stabilitas

Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

3.1.3 Mekanisme Penyusunan APBD

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Dasar penyusunan arah dan kebijakan umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rancangan tahunan yang merupakan bagian dari rencana menengah dan rencana jangka panjang yang dimuat dalam Rencana strategi Daerah atau dokumen perencanaan lainnya. Pemerintah Daerah dan DPRD menggunakan rencana strategi atau dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar penyusunan Arah dan kebijakan Umum APBD.

- b. Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu melakukan penjarangan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjarangan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antar lain: dengan pendapatan, turun lapangan, kuisisioner, dialog interaktif, kotak saran dan media masa.
- c. Penjarangan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat bermanfaat dalam penganggaran daerah di masa yang akan datang.
- d. Konsep awal arah dan kebijakan umum APBD dapat juga disusun berdasarkan pokok-pokok awal pikiran DPRD
- e. Disamping itu, penyusunan arah dan kebijakan umum APBD disetiap daerah harus memperhatikan pokok-pokok kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemerintah Atasan.
- f. Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melibatkan masyarakat pemerhati atau tenaga ahli untuk penyusunan konsep arah dan kebijakan APBD.